JP: JURNAL POLAHI

Volume 3, Issue 3, Page, 180-199, Year, 2025
ISSN: 3031-9978
URL: https://jp.iregway.com/index.php/polahi

Accepted: September 2025
Approved: November 2025
Published: Desember 2025

POTRET *ECHO CHAMBER* DIGITAL DAN KRISIS DEMOKRASI: DISTORSI OPINI PUBLIK DI ERA ALGORITMA DAN BUZZER POLITIK DI INDONESIA

Faradiba Azzahra
Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo
Email: faradibaazzahra@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the phenomenon of digital echo chambers and the crisis of democracy in Indonesia by analyzing the distortion of public opinion in the era of social media algorithms and political buzzers. The analysis focuses on two main aspects: the architecture of algorithms and the mechanisms through which echo chambers are formed in Indonesia, as well as the role of political buzzers and organized disinformation in manipulating public opinion within the context of digital democratic contestation. The research employs a qualitative approach using a literature study (library research) method. Data were collected through systematic searching and critical analysis of scholarly journal articles, academic books, research reports, and other relevant documents addressing social media algorithms, echo chambers, political buzzers, and the dynamics of digital democracy in Indonesia. Qualitative data analysis was conducted through thematic categorization, conceptual comparison, and synthesis of findings to develop a comprehensive understanding of the phenomenon under study. The findings indicate that social media algorithmic architecture plays a significant role in shaping echo chambers through content personalization, information filtering, and the reinforcement of users' preferences, thereby limiting exposure to diverse viewpoints. Meanwhile, political buzzers function as strategic actors in the production and dissemination of political narratives, including organized disinformation aimed at influencing public perception. The interaction between algorithmic mechanisms and buzzer activities leads to the fragmentation of the digital public sphere, the intensification of political polarization, and the weakening of the deliberative function of democracy. These conditions reflect a crisis of digital democracy characterized by distorted public opinion and a declining quality of political discourse in Indonesia.

Keywords: *Digital Echo Chambers, Social Media Algorithms, Political Buzzers, Disinformation, Digital Democracy.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memotret fenomena *echo chamber* digital dan krisis demokrasi di Indonesia dengan menelaah distorsi opini publik yang terjadi di era algoritma media sosial dan buzzer politik. Fokus kajian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu arsitektur algoritma dan mekanisme penciptaan *echo chamber* di Indonesia, serta peran buzzer politik dan disinformasi terorganisasi dalam memanipulasi opini publik pada kontestasi demokrasi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis kritis terhadap artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen relevan yang membahas algoritma media sosial, *echo chamber*, buzzer politik, dan dinamika demokrasi digital di Indonesia. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui pengelompokan tema, perbandingan konseptual, dan sintesis temuan untuk membangun pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur algoritma media sosial berperan signifikan dalam membentuk *echo chamber* melalui mekanisme personalisasi konten, penyaringan informasi, dan penguatan preferensi pengguna, sehingga membatasi paparan terhadap pandangan yang beragam. Di sisi lain, buzzer politik berfungsi sebagai aktor strategis dalam produksi dan distribusi narasi politik, termasuk disinformasi yang disebarkan secara terorganisasi untuk memengaruhi

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

persepsi publik. Interaksi antara algoritma dan aktivitas buzzer menyebabkan fragmentasi ruang publik digital, penguatan polarisasi politik, serta melemahnya fungsi deliberatif demokrasi. Kondisi ini menandai krisis demokrasi digital yang ditandai oleh distorsi opini publik dan menurunnya kualitas diskursus politik di Indonesia.

Kata kunci: *Echo Chamber* Digital, Algoritma Media Sosial, Buzzer Politik, Disinformasi, Demokrasi Digital.

PENDAHULUAN

Demokrasi Indonesia saat ini sedang berada dalam cengkeraman "kedaulatan algoritma" yang secara perlahan namun pasti membunuh nalar kritis warga negara di ruang publik digital. Kehadiran internet yang semula dielu-elukan sebagai fajar baru bagi kebebasan berpendapat kini justru bertransformasi menjadi penjara informasi yang sangat terstruktur melalui mekanisme ruang gema atau *echo chamber*. Fenomena *echo chamber* dalam era disinformasi digital berkontribusi signifikan terhadap krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik. Suriadi menjelaskan bahwa algoritma media sosial cenderung memperkuat filter bubble, sehingga individu lebih sering terpapar informasi yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Kondisi ini mendorong tumbuhnya sikap sinis terhadap institusi demokrasi karena informasi alternatif yang bersifat korektif semakin jarang diterima, sementara narasi emosional dan partisan justru mendominasi ruang publik digital (Suriadi, 2025).

Dalam konteks demokrasi Indonesia, media sosial telah membentuk ruang publik digital yang menyerupai ruang gema, di mana diskursus politik berlangsung secara terfragmentasi. Rosmiantin dan Isnaini menyoroti bahwa praktik buzzer politik memperparah kondisi tersebut, karena komunikasi politik tidak lagi berorientasi pada pertukaran argumen rasional, melainkan pada penguatan loyalitas kelompok. Akibatnya, etika demokrasi digital mengalami krisis, ditandai dengan meningkatnya polarisasi dan melemahnya deliberasi publik (Rosmiantin & Isnaini, 2025).

Kerentanan terhadap *echo chamber* juga tampak kuat pada generasi milenial dalam era post-truth. Sari dan Putra menemukan bahwa generasi ini lebih mudah terjebak dalam polarisasi opini akibat paparan konten politik berbasis algoritma. Situasi tersebut mencerminkan krisis rasionalitas politik, di mana kebenaran objektif sering dikalahkan oleh afiliasi emosional dan identitas kelompok yang terbentuk di ruang digital (Sari & Putra, 2026).

Dari perspektif teoretis yang lebih kritis, Wuryanta memandang *echo chamber* sebagai bagian dari defisit demokrasi yang lebih luas dalam konteks post-truth. Identitas siber dan wacana kebencian yang berkembang di ruang digital menciptakan kerangka baru demokrasi yang justru menjauh dari prinsip rasionalitas dan inklusivitas demokrasi liberal klasik. Demokrasi siber dalam kondisi ini berpotensi menjadi alat strategis elit digital untuk mempertahankan dominasi wacana (Wuryanta, 2018).

Dampak teknologi digital terhadap demokrasi juga ditunjukkan melalui melemahnya kualitas partisipasi warga negara. Madamang dan Hadmar menegaskan bahwa penggunaan internet dan media sosial tidak selalu berbanding lurus dengan kemajuan

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

demokrasi. Sebaliknya, keberadaan filter bubble dan *echo chamber* memicu resistensi sosial serta memperbesar konflik politik, sehingga demokrasi menghadapi tantangan serius dalam menjaga kohesi sosial (Madamang & Hadmar, 2025).

Fenomena *echo chamber* turut memperdalam krisis moral dan karakter dalam kehidupan demokratis. Agustina, Efendi, dan Safira menyatakan bahwa keterbatasan perspektif akibat konsumsi informasi yang homogen menghambat pembentukan sikap toleran dan kritis. Kondisi ini memperlemah fondasi demokrasi substantif yang menuntut warga negara berpikir terbuka dan menghargai perbedaan (Agustina et al., 2025).

Pendekatan filsafat kritis juga mengungkap bahwa *echo chamber* bukan sekadar persoalan teknis komunikasi, melainkan krisis rasionalitas manusia modern. Bahri, Putri, dan Harahap, melalui perspektif *Eclipse of Reason* Max Horkheimer, menilai bahwa polarisasi digital mencerminkan dominasi rasionalitas instrumental yang mengabaikan rasionalitas kritis. Demokrasi yang sehat, dalam pandangan ini, menuntut warga negara yang mampu keluar dari jebakan ruang gema digital (Bahri et al., 2026).

Upaya mengatasi krisis demokrasi digital juga dikaitkan dengan pentingnya literasi politik. Arifuddin dan Hermawan menunjukkan bahwa tanpa pendidikan literasi politik yang memadai, ruang publik digital pasca Pemilu 2024 rentan dimanfaatkan oleh aktor penyebar kebencian yang menunggangi echo chamber. Hal ini menandakan bahwa demokrasi digital Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan post-truth (Arifuddin & Hermawan, 2025).

Dari sudut pandang demokrasi deliberatif, Rakinda dan Sutrisno menilai bahwa mekanisme filter bubble dan *echo chamber* menghambat terciptanya tindakan komunikatif yang ideal di ruang publik digital. Untuk mengatasi krisis legitimasi demokrasi modern, tata kelola digital perlu diarahkan pada penciptaan ruang diskusi yang inklusif dan reflektif, bukan sekadar efisien secara algoritmik (Rakinda & Sutrisno, 2026).

Menariknya, dalam ruang ini, kebenaran tidak lagi diukur berdasarkan validitas data atau kekuatan argumen, melainkan berdasarkan seberapa sering sebuah narasi muncul di beranda media sosial seseorang. Fenomena ini menciptakan paradoks yang mengerikan di mana di tengah kelimpahan informasi, masyarakat Indonesia justru semakin terisolasi dalam bias kognitif yang sempit, yang pada akhirnya meruntuhkan fondasi dialog antarwarga yang menjadi syarat mutlak tegaknya sebuah sistem demokrasi yang sehat. Lingkup kajian juga memotret bahwa *echo chamber* yang mewabah melalui media sosial telah berimplikasi pada persepsi politik.

Media sosial berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap politik dan tingkat partisipasi politik. Interaksi politik yang berlangsung di media sosial memungkinkan individu membangun pemahaman politik berdasarkan pengalaman digital sehari-hari, seperti diskusi daring, konsumsi konten politik, dan keterlibatan simbolik (Sahi et al., 2024).

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

Namun, dalam konteks paparan informasi yang selektif, persepsi politik yang terbentuk cenderung dipengaruhi oleh intensitas dan arah informasi yang beredar dalam jejaring sosial pengguna (Hafizi, 2023).

Pengaruh media terhadap persepsi politik sejatinya telah berlangsung sejak era media konvensional. Pemberitaan politik di surat kabar terbukti mampu membentuk persepsi mahasiswa terhadap partai politik dan proses pemilu melalui framing isu dan penekanan tertentu. Perbedaan utama dengan media sosial terletak pada sifat interaktif dan cepatnya penyebaran informasi, yang membuat pembentukan persepsi politik berlangsung lebih masif dan sulit dikontrol (Yunita, 2002).

Dalam konteks komunikasi politik elektoral, iklan politik memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi pemilih. Paparan pesan politik secara berulang mampu membentuk citra kandidat dan preferensi politik masyarakat. Ketika praktik ini berpindah ke media sosial, iklan politik yang ditargetkan secara algoritmik berpotensi memperkuat persepsi politik yang sempit karena pemilih hanya menerima pesan yang selaras dengan kecenderungan awalnya (Anshori, 2018).

Media sosial juga menjadi sumber utama pembentukan persepsi politik generasi muda. Persepsi politik siswa terbentuk melalui narasi isu yang populer di media sosial, bukan semata-mata berdasarkan pemahaman mendalam terhadap substansi politik. Akibatnya, persepsi yang terbentuk cenderung dipengaruhi oleh opini dominan dalam lingkungan digital, sehingga membuka ruang bagi penyederhanaan isu dan polarisasi pandangan politik (Rohim & Wardana, 2019).

Selain memengaruhi persepsi terhadap aktor dan proses politik, media sosial juga membentuk persepsi publik terhadap institusi negara. Percakapan politik di media sosial mampu membangun sentimen kolektif terhadap sistem peradilan, baik positif maupun negatif. Dalam kondisi tertentu, persepsi publik lebih dipengaruhi oleh opini yang viral dibandingkan informasi faktual yang berimbang, sehingga persepsi politik berkembang secara emosional (Muhammad & Tanggahma, 2024).

Bagi pemilih pemula, media sosial berfungsi sebagai sumber utama informasi politik sekaligus ruang pembentukan kepercayaan politik. Paparan pesan politik melalui media sosial memengaruhi persepsi terhadap aktor politik dan mendorong partisipasi politik, meskipun partisipasi tersebut sering kali bersifat ekspresif, seperti menyukai atau membagikan konten, bukan keterlibatan substantif dalam proses demokrasi (Aji, 2020).

Bentuk komunikasi politik non-konvensional, seperti satire politik, juga berkontribusi dalam membentuk persepsi politik generasi muda. Satire politik di media sosial mampu menarik perhatian dan meningkatkan minat terhadap isu politik, tetapi pada saat yang sama berpotensi menyederhanakan persoalan politik kompleks menjadi narasi humoristik yang bias, sehingga memengaruhi cara pandang generasi muda terhadap dinamika politik (Astuti & Wulandari, 2025).

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

Pengaruh media sosial terhadap persepsi politik juga berkaitan dengan partisipasi politik pemuda. Platform seperti Instagram memiliki pengaruh terhadap persepsi pemuda mengenai keterlibatan politik, meskipun pengaruh tersebut tidak selalu signifikan secara kuantitatif. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial lebih berperan dalam membentuk sikap dan persepsi politik dibandingkan mendorong partisipasi politik yang bersifat langsung dan struktural (Susilowati, 2019).

Dalam konteks kampanye politik kontemporer, media sosial digunakan secara strategis untuk membentuk persepsi publik. Kampanye digital yang dirancang secara segmentatif mampu memengaruhi cara masyarakat memandang kandidat dan isu politik tertentu. Namun, strategi ini juga berpotensi menciptakan fragmentasi persepsi publik karena setiap kelompok menerima narasi politik yang berbeda (Faradis & Al Fauzah, 2023).

Lebih luas lagi, media sosial turut membentuk persepsi publik terhadap isu politik global. Diskursus digital mengenai konflik internasional menunjukkan bahwa persepsi publik sering kali dibangun melalui narasi emosional dan visual yang kuat. Kondisi ini menyebabkan persepsi politik berkembang secara parsial dan memperkuat polarisasi opini di ruang publik digital (Elza, 2025).

Ruang gema digital yang kita huni saat ini sebenarnya adalah hasil dari "kapitalisme pengawasan" yang mengeksploitasi data pribadi manusia untuk mengontrol perilaku politik mereka tanpa mereka sadari. Potret kajia lain juga menunjukkan bahwa Tidak mengherankan apabila dalam ruang media sosial yang terfragmentasi dan didominasi oleh algoritma, muncul potensi besar bagi berkembangnya industri buzzer. Struktur ekonomi politik media digital memungkinkan aktor tertentu memanfaatkan logika algoritmik untuk memperkuat *echo chamber* melalui produksi dan distribusi konten provokatif yang berulang. Dalam konteks ini, polarisasi politik tidak lagi sekadar hasil perbedaan pandangan ideologis, tetapi menjadi komoditas yang dikelola secara sistematis untuk memenangkan perhatian publik dan mengarahkan persepsi politik masyarakat sesuai kepentingan tertentu (Syadila et al., 2025).

Keberadaan buzzer juga berdampak pada legitimasi media dan kualitas ruang publik digital. Narasi politik yang diproduksi secara masif dan terus-menerus muncul di lini masa pengguna menciptakan ilusi konsensus serta mempersempit ruang bagi informasi alternatif. Kondisi ini memperkuat ruang gema politik, di mana opini yang sama direproduksi secara berulang hingga dianggap sebagai kebenaran dominan. Akibatnya, kepercayaan terhadap media pers dan institusi demokrasi mengalami erosi karena masyarakat kesulitan membedakan antara informasi organik dan propaganda terkoordinasi (Apriyanto, 2025).

Meningkatnya fenomena *post-truth* atau pasca-kebenaran di Indonesia semakin memperdalam krisis tersebut. Dalam situasi ini, fakta ilmiah dan data statistik tidak lagi memiliki daya korektif yang kuat terhadap opini publik yang telah terpolarisasi. Emosi dan keyakinan personal justru menjadi faktor

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

dominan dalam pembentukan sikap politik. Ketika buzzer menyebarkan disinformasi yang selaras dengan preferensi kelompok tertentu, informasi tersebut mudah diterima sebagai kebenaran karena memberikan resonansi emosional. Mekanisme *echo chamber* kemudian bekerja menyaring informasi yang berlawanan, sehingga sanggahan atau klarifikasi tidak pernah menjangkau audiens yang telah terkunci dalam ruang gema tersebut. Konsekuensinya, masyarakat menjadi semakin imun terhadap fakta, dan dalam konteks Indonesia kondisi ini berpotensi memicu konflik horizontal karena setiap kelompok hidup dalam "realitas" yang berbeda tanpa landasan fakta bersama untuk berdialog secara rasional.

Krisis demokrasi ini semakin diperparah oleh lemahnya regulasi terhadap platform teknologi global serta kurang optimalnya penegakan hukum terhadap aktor intelektual di balik industri buzzer. Pemerintah kerap menitikberatkan pada penindakan individu penyebar hoaks di tingkat akar rumput, sementara struktur pendanaan dan jejaring politik yang mengorkestrasi manipulasi opini publik relatif luput dari pengawasan. Di sisi lain, platform media sosial sering berlindung di balik dalih kebebasan berekspresi untuk menghindari tanggung jawab atas desain algoritma yang cenderung mempromosikan konten sensasional dan ekstrem demi kepentingan ekonomi. Padahal, algoritma bukanlah entitas netral; ia dirancang dengan preferensi tertentu yang mengutamakan keterlibatan (engagement) daripada kualitas informasi. Tanpa transparansi dan akuntabilitas algoritmik, ruang digital Indonesia berpotensi terus menjadi arena kompetisi manipulatif di mana dominasi suara ditentukan oleh intensitas dan dukungan bot, bukan oleh validitas argumen.

Berdasarkan latar problematik tersebut, penelitian ini secara kritis bertujuan membedah anatomi distorsi opini publik di Indonesia dengan menelusuri bagaimana interaksi antara teknologi algoritma dan praktik buzzer politik membentuk krisis demokrasi yang bersifat sistemik. Artikel ini akan mengeksplorasi pergeseran pola komunikasi media sosial dari model dialogis menuju model manipulatif melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan komunikasi politik, sosiologi digital, dan analisis data siber. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa ancaman terhadap demokrasi kontemporer tidak lagi hadir dalam bentuk konvensional seperti kudeta militer, melainkan melalui degradasi kualitas informasi di ruang digital. Pemahaman komprehensif mengenai mekanisme *echo chamber* dan strategi buzzer menjadi langkah awal yang krusial untuk merevitalisasi ruang publik dan menjaga kedaulatan informasi sebagai fondasi utama kedaulatan rakyat di era algoritma.

METODE

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan metode kualitatif dengan penekatan studi pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif untuk mengeksplorasi fenomena distorsi opini publik di Indonesia secara mendalam. Idealnya, penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur atau menguji hubungan variabel secara statistik, melainkan

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

untuk menafsirkan bagaimana makna dibentuk, dipahami, dan dihidupi oleh individu dalam konteks sosial tertentu. Dengan demikian, realitas sosial dipahami sebagai sesuatu yang bersifat subjektif dan dikonstruksi melalui pengalaman serta interaksi manusia (Greene, 2004).

Studi literatur (*library research*) dalam penelitian kualitatif memanfaatkan sumber-sumber pustaka sebagai basis utama pengumpulan data. Literatur dipandang sebagai ruang produksi pengetahuan yang merekam praktik sosial, pengalaman, serta pola pemanfaatan informasi dalam kehidupan akademik dan sosial. Melalui penelaahan terhadap buku, artikel jurnal, dan dokumen ilmiah, peneliti dapat menelusuri dinamika pemikiran dan makna sosial tanpa harus melakukan observasi langsung di lapangan (Lincoln, 2002).

Oleh karena itu, fokus utama dari metode ini adalah mengumpulkan, mengkritisi, dan mensintesis berbagai data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang memiliki relevansi tinggi terhadap isu algoritma dan buzzer politik. Peneliti memposisikan literatur bukan sekadar sebagai pelengkap informasi, melainkan sebagai sumber data utama yang dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang komprehensif tanpa memerlukan data lapangan primer.

Tahapan penelitian dimulai dengan proses identifikasi dan pengumpulan literatur melalui teknik pencarian sistematis pada berbagai basis data akademik. Peneliti menelusuri sumber-sumber dari portal jurnal bereputasi seperti Google Scholar, ResearchGate, serta pangkalan data jurnal nasional untuk mendapatkan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pemilihan rentang waktu ini dilakukan secara sengaja untuk menangkap dinamika politik digital di Indonesia yang mulai terakselerasi sejak tahun 2014 hingga saat ini. Kata kunci yang digunakan dalam proses pencarian ini sangat spesifik, mencakup "manipulasi opini publik", "efek ruang gema digital", "industri buzzer Indonesia", dan "polarisasi algoritma", guna memastikan data yang terkumpul benar-benar relevan dengan fokus kajian.

Setelah literatur terkumpul, dilakukan proses seleksi dan verifikasi sumber menggunakan teknik *purposive sampling* terhadap materi bacaan. Tidak semua literatur yang ditemukan digunakan dalam analisis; peneliti menetapkan kriteria inklusi yang ketat, di mana hanya literatur yang menyajikan data empiris, analisis mendalam, atau laporan investigasi mengenai praktik siber di Indonesia yang dipilih. Dokumen-dokumen yang bersifat opini tanpa landasan riset yang kuat dieksklusi untuk menjaga objektivitas hasil penelitian. Selain artikel jurnal, penelitian ini juga menginkorporasikan laporan-laporan kredibel dari lembaga riset media dan teknologi serta naskah kebijakan terkait regulasi ruang digital di Indonesia sebagai penguat konteks sosiopolitik.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif dengan model interaktif. Data yang telah terkumpul melalui catatan literatur

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

diorganisir ke dalam tema-tema kunci, kemudian dibandingkan antara satu sumber dengan sumber lainnya untuk menemukan pola-pola konsisten mengenai cara kerja algoritma dan strategi buzzer. Peneliti melakukan sinkronisasi data sekunder tersebut untuk melihat keterhubungan antara mekanisme teknis platform dan dampaknya terhadap perilaku politik publik. Proses ini diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara mensintesis temuan-temuan parsial dari berbagai literatur menjadi satu narasi utuh yang menjawab permasalahan krisis demokrasi di era digital.

Validitas analisis dalam studi literatur ini dijamin melalui teknik cek silang antar-sumber (*cross-source verification*) guna menghindari bias dari satu sudut pandang penulis. Peneliti membandingkan temuan dari riset-riset terdahulu yang memiliki metodologi berbeda untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik memiliki landasan yang kuat.

Dengan melakukan komparasi terhadap beragam literatur yang membahas fenomena buzzer dari perspektif komunikasi, hukum, dan sosiologi, penelitian ini mampu menghadirkan analisis yang multidimensional namun tetap terfokus pada persoalan utama, yaitu distorsi opini publik di Indonesia. Pendekatan ini selaras dengan prinsip analisis data kualitatif sebagai proses sistematis untuk menelaah, membandingkan, dan mensintesis data non numerik guna membangun pemahaman yang bermakna terhadap suatu fenomena. Dalam konteks literature review, analisis kualitatif berfungsi sebagai strategi sintesis untuk mengintegrasikan berbagai temuan penelitian terdahulu melalui teknik seperti constant comparison, domain analysis, dan taxonomic analysis (Onwuegbuzie, Leech, dan Collins, 2012). Proses tersebut dilakukan melalui pengodean, pengelompokan kategori, dan penarikan tema utama sehingga pola serta hubungan antar konsep dapat diidentifikasi secara sistematis dan transparan (Salmona dan Kaczynski, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arsitektur Algoritma dan Mekanisme Penciptaan *Echo chamber* di Indonesia

Echo chamber merujuk pada kondisi ruang komunikasi digital di mana individu cenderung hanya terpapar pada informasi, pandangan, dan opini yang selaras dengan preferensi atau keyakinan awalnya. Dalam ruang ini, algoritma platform digital berperan aktif menyaring dan menyajikan konten sesuai minat pengguna, sehingga mempersempit kemungkinan bertemunya pandangan yang berbeda. Akibatnya, proses pertukaran gagasan yang kritis dan dialogis menjadi terbatas karena informasi yang beredar terus berulang dan saling menguatkan (Farida & Abidin, 2021).

Secara konseptual, *echo chamber* dapat dipahami sebagai “ruang gema” yang hanya memperdengarkan suara yang sama kepada penggunanya. Informasi yang beredar tidak diuji melalui keberagaman perspektif, melainkan diterima secara berulang hingga membentuk persepsi seolah-olah pandangan tersebut bersifat umum dan tidak terbantahkan. Kondisi ini berpotensi melemahkan sikap toleransi, karena individu semakin sulit memahami atau menerima perbedaan

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

pandangan sosial, politik, maupun keagamaan (Effendi & Alfauzan, 2021).

Dalam konteks media sosial dan politik elektoral, *echo chamber* berkaitan erat dengan fenomena filter bubble dan bias politik. Ruang digital yang terfragmentasi membuat pengguna terjebak dalam arus informasi yang homogen, sehingga memperkuat polarisasi opini. Persepsi politik yang terbentuk tidak lagi berbasis pada pertimbangan rasional yang komprehensif, melainkan pada narasi dominan yang terus direproduksi dalam lingkaran digital tertentu (Manuputty et al., 2025).

Echo chamber juga tidak hanya menciptakan keterputusan informasi, tetapi menghadirkan ilusi keterhubungan sosial. Individu merasa terhubung dan didukung oleh komunitas digital yang sependapat, padahal hubungan tersebut dibangun di atas keseragaman pandangan, bukan dialog dan saling pengertian. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas relasi sosial dan menggantikan empati dengan afiliasi emosional sempit (Kristen, 2025).

Dari perspektif komunikasi politik, *echo chamber* dipahami sebagai ruang yang menutup kemungkinan terjadinya perdebatan sehat. Lingkungan komunikasi semacam ini tidak memungkinkan terjadinya koreksi informasi secara efektif, karena perbedaan pandangan cenderung disaring atau ditolak sejak awal. Akibatnya, ruang publik digital kehilangan fungsi deliberatifnya sebagai arena pertukaran argumen rasional (Hasfi, 2019).

Echo chamber juga memiliki keterkaitan erat dengan penyebaran hoaks dan misinformasi. Ketika individu berada dalam ruang gema tertentu, informasi palsu yang sesuai dengan keyakinan kelompok akan lebih mudah diterima dan disebarluaskan tanpa proses verifikasi. Proses ini mempercepat normalisasi misinformasi karena pengulangan pesan dianggap sebagai validasi kebenaran (Harimasang, 2023).

Dalam kajian komunikasi dakwah dan budaya digital, *echo chamber* dipahami sebagai ruang penerimaan pesan yang bersifat massal namun seragam. Pesan yang sama diterima oleh banyak individu tanpa adanya ruang dialog yang kritis, sehingga pemaknaan pesan menjadi dangkal dan rentan dimanipulasi. Kondisi ini menuntut strategi komunikasi yang lebih reflektif dan kontekstual agar pesan tidak terjebak dalam homogenitas makna (Marwantika, 2019).

Secara normatif, *echo chamber* sering dipandang sebagai tantangan serius bagi etika toleransi dan kehidupan demokratis. Lingkungan komunikasi yang tertutup dan anti-dialog memperkuat polarisasi sosial karena mendorong sikap eksklusif dan penolakan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, penguatan ruang komunikasi yang mendorong dialog sehat dan keterbukaan perspektif menjadi prasyarat penting untuk keluar dari jebakan *echo chamber* (Nurjaman, 2025; Hidayat, 2022).

Dari sudut pandang psikologi komunikasi, *echo chamber* berkaitan dengan fenomena selective exposure dan cognitive dissonance. Individu secara aktif memilih informasi yang mengonfirmasi keyakinannya untuk menghindari ketidaknyamanan psikologis akibat paparan pandangan yang

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

bertentangan. Mekanisme ini menjelaskan mengapa *echo chamber* dapat bertahan dan menguat dalam ruang digital yang menyediakan pilihan informasi tanpa batas (Athaya, 2022).

Menyikapi hal tersebut, Temuan berbagai kajian menunjukkan bahwa fenomena *echo chamber* politik di Indonesia telah berkembang menjadi struktur sosial digital yang sistemik dan berdampak luas terhadap dinamika demokrasi. Berbagai penelitian mengonfirmasi bahwa algoritma media sosial secara aktif mengelompokkan pengguna berdasarkan kesamaan preferensi politik, sehingga interaksi berlangsung dalam ruang informasi yang homogen dan memperkuat ilusi konsensus (Raza et al., 2025).

Dalam konteks elektoral, seperti Pemilihan Presiden 2019 dan 2024, paparan informasi yang berulang dan searah terbukti memengaruhi preferensi politik masyarakat, membatasi akses terhadap pandangan alternatif, serta memperdalam polarisasi (Dani, 2021; Manuputty et al., 2025). Ketergantungan publik pada media sosial sebagai sumber utama informasi politik semakin memperkuat fragmentasi opini dan menurunkan kualitas literasi politik, terutama di kalangan generasi muda dan Generasi Z yang berada dalam lingkungan informasi tersegmentasi dan emosional (Laventia et al., 2025; Pamungkas, 2025).

Pada level akademik dan mahasiswa, paparan informasi homogen mendorong afirmasi kelompok dan resistensi terhadap perspektif berbeda, sehingga memperbesar risiko polarisasi jangka panjang (Nayla, 2023). Selain itu, strategi kampanye digital yang bersifat mikro-targeting memperkuat fragmentasi ruang publik dan menggeser fungsi media sosial dari arena deliberatif menjadi instrumen manipulasi opini (Fatih, 2024). Dampaknya tidak hanya pada pembentukan sikap politik, tetapi juga pada meningkatnya eskalasi konflik sosial akibat reproduksi narasi konfrontatif dan ujaran kebencian di ruang digital (Rambe et al., 2025).

Bahkan pada tingkat perilaku pencarian informasi, pengguna menyadari keterjebakan dalam arus konten serupa, namun tetap sulit keluar karena desain platform yang secara sistematis mereproduksi preferensi sebelumnya (Marwan et al., 2023). temuan-temuan pada studi literatur tersebut mengindikasikan bahwa *echo chamber* di Indonesia bukan sekadar gejala komunikasi digital, melainkan mekanisme struktural yang membentuk realitas politik, memperdalam polarisasi, dan menantang kualitas demokrasi secara substansial.

Merekenostruksi hal diatas, dapatlah dipetakan sisi aalisis temuan sebagaimaa yang dikonstrukiska dalam tabel temuan dibawah ini;

Tabel 1.

Algoritma dan Mekanisme Penciptaan *Echo chamber* di Indonesia

Komponen Arsitektur Algoritma	Mekanisme Penciptaan Echo Chamber	Dampak Struktural di Ruang Digital
Personalisasi dan Pelacakan Preferensi	Algoritma merekam jejak interaksi (like, share, komentar, durasi tonton) lalu menyajikan konten yang	Paparan informasi menjadi homogen dan mempersempit akses terhadap

*Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

	sejalan dengan preferensi awal pengguna	perspektif alternatif
Sistem Rekomendasi & Micro-Targeting	Platform merekomendasikan akun, grup, dan pesan politik berdasarkan segmentasi demografis serta psikografis	Fragmentasi ruang publik dan terbentuknya komunitas digital yang terisolasi secara ideologis
Engagement-Based Ranking	Konten dengan respons emosional tinggi diprioritaskan dalam linimasa dan fitur trending	Dominasi narasi provokatif, penguatan polarisasi, dan marginalisasi argumen rasional
Repetisi Narasi & Jaringan Terkoordinasi	Distribusi konten berulang dalam jaringan seideologis, termasuk melalui akun terorganisir	Ilusi konsensus dan normalisasi misinformasi sebagai kebenaran kolektif
Feedback Loop Algoritmik	Preferensi awal diperkuat melalui siklus interaksi berulang yang terus direproduksi sistem	Pengguna terkunci dalam ruang gema digital dan mengalami radikalisasi opini secara bertahap

Tabel tersebut menunjukkan bahwa arsitektur algoritma media sosial di Indonesia bekerja melalui sistem personalisasi, segmentasi, dan penguatan interaksi berbasis emosi yang secara simultan membentuk ruang komunikasi tertutup. Setiap komponen mulai dari pelacakan preferensi, sistem rekomendasi dan micro targeting, pemeringkatan berbasis engagement, repetisi narasi dalam jaringan terkoordinasi, hingga siklus umpan balik algoritmik berkontribusi dalam menciptakan pola paparan informasi yang homogen dan berulang. Mekanisme ini tidak hanya mempersempit akses terhadap perspektif alternatif, tetapi juga memproduksi ilusi konsensus, memperkuat fragmentasi ruang publik, serta mendorong polarisasi opini secara bertahap. Artinya *echo chamber* di Indonesia terbentuk sebagai konsekuensi dari desain struktural platform digital yang secara sistematis mereproduksi preferensi pengguna dan menggeser fungsi ruang publik dari arena deliberatif menjadi arena afirmasi kelompok.

Temuan analisis pada tabel tersebut berkeselarasan dengan hasil kajian literatur yang menegaskan bahwa echo chamber di Indonesia bekerja melalui mekanisme algoritmik yang secara sistematis menyaring, mengurutkan, dan menampilkan konten berdasarkan preferensi pengguna sebelumnya. Pola personalisasi, rekomendasi tersegmentasi, serta penguatan interaksi berbasis engagement sebagaimana tergambar dalam tabel sejalan dengan temuan bahwa ruang konsumsi informasi digital semakin homogen dan menutup kemungkinan dialog lintas pandangan (Aqida et al., 2025). Fragmentasi ruang publik dan terbentuknya komunitas digital yang terisolasi juga mengonfirmasi kajian tentang menguatnya sikap eksklusif dan melemahnya moderasi sosial dalam masyarakat plural (Hidayah & Nur, 2024). Selain itu, aspek kesadaran pengguna yang terbatas terhadap cara kerja algoritma memperkuat temuan mengenai ilusi netralitas informasi, sehingga reproduksi opini berlangsung tanpa refleksi kritis (Sinambela, 2024). Dampak struktural berupa penguatan emosi kolektif dan eskalasi

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

konflik sosial sebagaimana tercantum dalam tabel turut selaras dengan penelitian tentang distorsi komunikasi politik di ruang digital (Rambe et al., 2025). Bahkan, implikasi terhadap generasi muda dan kualitas pendidikan politik menunjukkan konsistensi dengan literatur yang menyoroti dominasi bias algoritma dan paparan sepihak sebagai faktor yang mendorong partisipasi politik emosional dan kurang rasional (Laventia et al., 2025). Hal ini mempertegas pola temuan empiris dalam berbagai kajian yang melihat echo chamber sebagai mekanisme struktural yang membentuk realitas sosial dan politik digital di Indonesia.

Buzzer Politik dan Disinformasi Terorganisi Diantara Manipulasi Opini Publik dalam Kontestasi Demokrasi Digital

Buzzer politik sebagai merupakan aktor komunikasi yang berperan dalam menyebarluaskan pesan kampanye politik melalui media sosial. Aktivitas buzzer dipahami sebagai bagian dari strategi komunikasi politik digital yang memanfaatkan fitur jejaring sosial untuk meningkatkan visibilitas pesan, membangun citra kandidat, serta memengaruhi persepsi publik. Dalam pengertian ini, buzzer kerap diposisikan sebagai perpanjangan tangan aktor politik dalam praktik kampanye berbasis media baru (Felicia & Loisa, 2018).

Namun, pengertian buzzer politik dalam perkembangan selanjutnya menunjukkan keragaman tafsir dan sering kali mengalami penyempitan makna. Buzzer tidak lagi sekadar dipahami sebagai penyebar pesan kampanye, tetapi juga dilekatkan dengan praktik manipulasi opini, distorsi informasi, dan produksi narasi kontroversial. Ketidakjelasan batas antara buzzer sebagai komunikator politik dan buzzer sebagai aktor propaganda menyebabkan istilah ini kerap dimaknai secara negatif dalam pemberitaan media dan diskursus publik (Pradana et al., 2023).

Dari perspektif hukum dan demokrasi, buzzer politik dipandang sebagai fenomena yang berpotensi mengganggu prinsip keadilan elektoral. Aktivitas buzzer yang tidak transparan, penggunaan akun anonim, serta penyebaran informasi menyesatkan dinilai dapat merusak integritas proses pemilu dan melemahkan prinsip demokrasi yang adil dan setara. Dalam konteks ini, buzzer politik tidak hanya menjadi isu komunikasi, tetapi juga persoalan regulasi dan penegakan hukum (Daeni & Rachmarani, 2023; Kurniawati, 2023).

Pendekatan lain menempatkan buzzer politik sebagai bagian dari praktik propaganda modern di ruang digital. Buzzer dipahami sebagai aktor yang secara terorganisasi memproduksi dan mendistribusikan pesan politik untuk membentuk opini publik, memperkuat loyalitas kelompok, serta melemahkan lawan politik. Aktivitas ini sering kali memanfaatkan emosi, isu sensitif, dan polarisasi sebagai strategi utama dalam menarik perhatian publik (Husein, 2024; Miqdad, 2024).

Sementara itu, kajian ekonomi politik media menyoroti buzzer politik sebagai bagian dari industri komunikasi digital yang melibatkan relasi kuasa antara aktor politik, pemilik modal, dan platform media sosial. Dalam kerangka ini, buzzer tidak lagi dipahami sebagai aktor individual semata, melainkan

*Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

sebagai komponen dari sistem produksi wacana politik yang digerakkan oleh kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Pengertian ini menegaskan bahwa fenomena buzzer politik bersifat struktural dan tidak dapat dilepaskan dari logika kapitalisme platform (Sugiono, 2020; Tukan, 2022; Arianto, 2022).

Menyikapi hal tersebut, temuan kajian dalam literatur menunjukkan bahwa pola permainan pesan politik yang dilakukan oleh buzzer di Indonesia mengalami pergeseran seiring dengan karakteristik media sosial yang semakin kompleks. Buzzer tidak lagi sekadar menyebarkan pesan kampanye secara langsung, melainkan memainkan strategi komunikasi yang adaptif terhadap logika algoritma, ritme viralitas, serta preferensi audiens digital. Pola ini membuat pesan politik dikemas secara repetitif, emosional, dan konfrontatif sehingga mampu bertahan lebih lama dalam ruang perhatian publik (Yulianto, 2023).

Denga kata lain bahwa sepak terjang buzzer dalam komunikasi politik digital sangat dipengaruhi oleh algoritma platform media sosial, khususnya Twitter/X. Algoritma berperan dalam memperkuat visibilitas narasi tertentu melalui mekanisme trending topic, retweet massal, dan amplifikasi akun terkoordinasi. Dalam konteks ini, buzzer berfungsi sebagai aktor yang secara sadar memanfaatkan celah algoritmik untuk membentuk persepsi politik dan mengarahkan percakapan publik sesuai kepentingan tertentu

Dalam kerangka propaganda politik, buzzer dipahami sebagai alat strategis dalam pengembangan opini publik di media sosial. Pesan yang disebarkan tidak selalu bersifat eksplisit, melainkan sering kali disamarkan dalam bentuk humor, sindiran, simbol identitas, atau narasi sehari-hari. Pola ini membuat propaganda buzzer sulit dikenali sebagai pesan politik langsung, namun efektif dalam mempengaruhi sikap dan preferensi pengguna media sosial (Puspita et al., 2025).

Penelitian pada konteks politik lokal menunjukkan bahwa buzzer juga memainkan peran penting dalam fragmentasi audiens dan permainan identitas politik. Media sosial menjadi arena di mana pesan politik disesuaikan dengan karakter komunitas tertentu, sehingga memperkuat resonansi emosional sekaligus memperdalam segmentasi pemilih. Pola ini menandai pergeseran otoritas politik dari institusi formal ke aktor-aktor informal di ruang digital (Tasrif, 2025).

Dari perspektif ekonomi politik media, pola kerja buzzer di Indonesia menunjukkan adanya sistem yang terorganisasi dan terintegrasi dengan kepentingan politik serta ekonomi. Aktivitas buzzer tidak hanya berorientasi pada penyebaran pesan positif, tetapi juga mencakup produksi disinformasi, kampanye negatif, dan serangan terkoordinasi terhadap lawan politik. Pola ini memperlihatkan bahwa buzzer beroperasi sebagai bagian dari industri komunikasi politik digital yang sistematis (Syadila et al., 2025).

Selain itu, sejumlah kajian menyoroti implikasi normatif dari pola permainan pesan buzzer, terutama dalam konteks etika, hukum, dan kohesi sosial. Aktivitas buzzer yang menyerang personal, menyebarkan kebencian, serta menormalisasi kekerasan simbolik dinilai

*Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

berpotensi merusak kualitas demokrasi dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, fenomena buzzer tidak hanya dipahami sebagai praktik komunikasi politik, tetapi juga sebagai tantangan serius bagi tata kelola ruang publik digital di Indonesia (Alfikri, 2024; Anugerah, 2020; Kurniawan, 2025; Wulandari, 2025).

Dapat direduksi analisis hasil temuan dalam tabel dibawah ini;

Tabel 2.

Buzzer Politik dan Disinformasi Terorganisasi dalam Kontestasi Demokrasi Digital di Indonesia

Dimensi Analisis	Mekanisme Operasional Buzzer Politik	Dampak terhadap Opini Publik dan Demokrasi Digital
Transformasi Peran Buzzer	Buzzer beroperasi tidak hanya sebagai penyebar pesan kampanye, tetapi sebagai produsen narasi yang adaptif terhadap logika algoritma dan viralitas	Pergeseran fungsi komunikasi politik dari informatif menjadi manipulatif dan berbasis persepsi
Strategi Disinformasi Terorganisasi	Produksi dan distribusi pesan dilakukan secara terkoordinasi melalui akun anonim, retweet massal, dan amplifikasi jaringan	Distorsi informasi, pembentukan ilusi dukungan mayoritas, dan kaburnya batas antara fakta dan propaganda
Eksploitasi Algoritma Platform	Pemanfaatan fitur trending topic, engagement tinggi, dan ritme percakapan digital untuk meningkatkan visibilitas isu tertentu	Dominasi narasi tertentu dalam ruang publik digital dan pengalihan agenda percakapan publik
Segmentasi dan Fragmentasi Audiens	Pesan politik disesuaikan dengan karakter komunitas digital tertentu untuk memperkuat resonansi emosional	Fragmentasi pemilih, penguatan identitas kelompok, dan melemahnya ruang dialog lintas pandangan
Integrasi dalam Industri Komunikasi Politik Digital	Aktivitas buzzer terhubung dengan kepentingan politik dan ekonomi dalam sistem yang terorganisasi	Komersialisasi opini publik, penurunan kualitas demokrasi, serta meningkatnya konflik dan polarisasi sosial

Tabel tersebut menunjukkan bahwa praktik buzzer politik dan disinformasi terorganisasi memiliki korelasi langsung dengan terbentuknya echo chamber dalam ruang publik digital Indonesia. Strategi produksi narasi yang repetitif, emosional, dan tersegmentasi memperkuat mekanisme personalisasi algoritma yang telah lebih dahulu mengelompokkan pengguna berdasarkan preferensi politiknya. Ketika buzzer memanfaatkan fitur trending, retweet massal,

*Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

serta amplifikasi akun terkoordinasi, narasi tertentu memperoleh visibilitas tinggi dan terus beredar dalam komunitas digital yang homogen. Kondisi ini mempercepat terbentuknya ruang gema karena pesan yang sama berulang kali dikonsumsi oleh audiens yang seideologis, sehingga menciptakan ilusi konsensus dan memperdalam polarisasi. Dengan demikian, buzzer politik tidak hanya beroperasi sebagai aktor manipulasi opini, tetapi juga berfungsi sebagai katalis yang memperkuat struktur echo chamber melalui eksploitasi celah algoritmik dan segmentasi audiens. Interaksi antara arsitektur algoritma dan strategi buzzer inilah yang menjadikan distorsi opini publik dalam demokrasi digital Indonesia bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Ulasan mengenai keberadaan buzzer dalam membentuk ruang opini publik politik juga selaras dengan berbagai kajian yang menegaskan adanya pergeseran peran buzzer dari ranah komersial ke arena politik digital. Buzzer dipahami sebagai aktor komunikasi yang memiliki pengaruh signifikan dalam menggiring opini publik melalui kekuatan jejaring, frekuensi pesan, dan legitimasi simbolik di media sosial. Kehadiran buzzer memungkinkan narasi politik tertentu memperoleh visibilitas tinggi dan diterima sebagai wacana dominan di ruang publik digital (Mustika, 2019).

Kajian mutakhir menunjukkan bahwa buzzer politik berperan strategis dalam pembentukan opini publik melalui pemanfaatan algoritma platform media sosial, khususnya dalam konteks kampanye elektoral. Strategi komunikasi yang digunakan buzzer mencakup pengemasan pesan visual, narasi personal, serta penggunaan simbol politik yang resonan dengan audiens. Pola ini terbukti berpengaruh terhadap sikap dan persepsi publik, terutama pada kelompok pemilih aktif media sosial (Assadiyah et al., 2025; Purnamasari & Wijanarko, 2024).

Dari perspektif ekonomi politik media, keberadaan buzzer tidak hanya mempengaruhi opini publik, tetapi juga berkontribusi pada penguatan polarisasi politik. Buzzer beroperasi sebagai bagian dari industri komunikasi politik digital yang terorganisasi, di mana produksi dan distribusi pesan politik dipengaruhi oleh kepentingan kekuasaan dan modal. Dalam konteks ini, ruang opini publik menjadi arena kontestasi yang sarat dengan manipulasi wacana dan konflik simbolik (Syadila et al., 2025).

Penelitian lain menegaskan bahwa dalam praktik kampanye politik digital, buzzer berfungsi sebagai alat manipulasi informasi yang efektif. Melalui teknik amplifikasi isu, trending topic, dan framing selektif, buzzer mampu membangun persepsi publik yang bias serta mempersempit ruang deliberasi rasional. Kondisi ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat bergeser dari ruang demokratis menjadi instrumen distorsi opini publik (Fatih, 2024; Arianto, 2022).

Selain itu, kajian berbasis hukum dan etika komunikasi politik menyoroti bahwa aktivitas buzzer memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi. Pada masa pemilu, buzzer kerap digunakan untuk menyerang lawan politik, menyebarkan disinformasi, serta membangun citra negatif

*Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

secara sistematis. Praktik ini menjadikan ruang opini publik tidak lagi netral, melainkan dipenuhi narasi yang dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu (Kurniawati, 2023; Wicaksono, 2024).

Prinsipnya, kualitas demokrasi sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi politik masyarakat dan dinamika sosial-politik yang berkembang. Pendidikan kewarganegaraan berperan sebagai sarana pendidikan politik yang penting dalam membentuk kesadaran kritis warga negara terhadap isu-isu publik, termasuk dalam menghadapi arus informasi di ruang digital (Sahi, 2024).

Dalam perkembangannya, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia juga mengalami dialektika antara pendekatan minimalis yang berfokus pada pengetahuan kewargaan dan pendekatan maksimalis yang menekankan partisipasi aktif serta keterlibatan kritis warga negara dalam kehidupan demokrasi (Sahi, 2025).

Selain itu, dinamika doktrin politik organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama menunjukkan bahwa orientasi politik masyarakat Indonesia terbentuk melalui proses historis yang panjang dan dipengaruhi oleh konteks sosial serta perubahan rezim politik dari masa kolonial hingga era reformasi (Sahi et al., 2023). Di sisi lain, preferensi politik kelompok masyarakat, termasuk pemilih disabilitas, dipengaruhi oleh nilai ideologis, persepsi terhadap kandidat, serta kekuatan kelompok sosial yang membentuk orientasi pilihan politik mereka dalam pemilu (Sahi et al., 2024).

Dalam praktik demokrasi elektoral, peran lembaga pengawas pemilu juga menjadi faktor penting dalam menjaga integritas demokrasi, khususnya dalam menangani praktik politik uang yang dapat merusak kualitas kompetisi politik dan mempengaruhi opini publik secara tidak sehat (Adjie et al., 2025). Di sisi lain, transformasi pendidikan politik di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai kebangsaan, kesadaran demokrasi, dan literasi politik sejak dini dapat menjadi strategi penting dalam membangun warga negara yang kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi (Hamim et al., 2025). Oleh karena itu, fenomena distorsi opini publik di era digital tidak dapat dilepaskan dari pentingnya penguatan pendidikan politik, literasi digital, serta pengawasan kelembagaan dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis kualitas ruang publik digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara arsitektur algoritma media sosial dan praktik buzzer politik yang terorganisasi. Echo chamber terbentuk sebagai konsekuensi struktural dari sistem personalisasi, segmentasi audiens, pemeringkatan berbasis engagement, serta siklus umpan balik algoritmik yang secara terus menerus mereproduksi preferensi pengguna. Mekanisme ini menghasilkan ruang komunikasi yang homogen, mempersempit paparan terhadap perspektif alternatif, serta mendorong terbentuknya ilusi konsensus yang memperkuat polarisasi sosial dan politik.

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

Di sisi lain, keberadaan buzzer politik mempercepat dan memperdalam mekanisme tersebut melalui strategi produksi narasi yang repetitif, emosional, dan tersegmentasi. Buzzer tidak lagi sekadar berperan sebagai penyebar pesan kampanye, melainkan sebagai aktor strategis yang memanfaatkan celah algoritmik untuk membentuk persepsi publik, mengarahkan agenda percakapan, serta menciptakan dominasi wacana tertentu di ruang digital. Pola kerja yang terorganisasi dan terintegrasi dengan kepentingan politik serta ekonomi menunjukkan bahwa praktik ini bersifat sistemik, bukan sporadis.

Korelasi antara arsitektur algoritma dan strategi buzzer menghasilkan distorsi opini publik yang berkelanjutan. Echo chamber menyediakan ruang yang kondusif bagi reproduksi disinformasi, sementara buzzer berfungsi sebagai katalis yang memperkuat sirkulasi narasi dalam komunitas digital yang homogen. Dampaknya tidak hanya terlihat pada meningkatnya polarisasi dan fragmentasi pemilih dalam kontestasi elektoral, tetapi juga pada melemahnya fungsi deliberatif ruang publik, menurunnya literasi politik, serta meningkatnya eskalasi konflik sosial berbasis identitas.

Hal ini menegaskan bahwa tantangan demokrasi digital di Indonesia bersifat struktural dan multidimensional. Permasalahan tidak semata terletak pada perilaku individu pengguna, melainkan pada desain sistem platform dan praktik komunikasi politik yang memanfaatkan logika algoritma untuk kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan regulasi, transparansi algoritma, peningkatan literasi digital, serta penataan etika komunikasi politik menjadi prasyarat penting untuk merevitalisasi ruang publik digital yang lebih inklusif, dialogis, dan demokratis.

DAFTAR RUJUKAN

Adjie, Z., Mahmud, R., Wantu, S. M., Yunus, R., & Sahi, Y. (2025). READING THE ELECTION FROM A SUPERVISORY PERSPECTIVE: A QUALITATIVE STUDY ON THE ROLE OF BAWASLU IN HANDLING MONEY POLITICS IN GORONTALO CITY. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, *10*(2), 607–627.

Agustina, D. H., Efendi, F., & Safira, B. W. (2025). Demokrasi di era digital: Peluang dan ancaman. *Journal of Social and Education.*

Aji, H. (2020). Media sosial dan pesan politik: Persepsi pemilih pemula dalam menerima pesan politik pada Pemilihan Umum 2019 melalui media sosial. *Research Fair Unisri.*

Alfikri, A. F. S. (2024). Istinbath hukum terhadap fenomena buzzer politik di media sosial. *Jurnal Ruhul Islam.*

Anshori, A. (2018). Pengaruh iklan politik terhadap persepsi pemilih Kota Medan tahun 2018. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi.*

Anugerah, B. (2020). Urgensi pengelolaan pendengung (buzzer) melalui kebijakan publik guna mendukung stabilitas politik di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI.*

Apriyanto, W. P. (2025). Analisis kriminologi terhadap fenomena buzzer di media sosial dan dampaknya terhadap legitimasi media pers. *Jurnal Sosial-Politika.*

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

Aqida, A., Aidah, S., & Amalia, A. R. (2025). Mengurai fenomena echo chamber: Implikasi untuk partisipasi politik di kalangan generasi muda. *Jurnal Inovasi Komunikasi.*

Arifuddin, N., & Hermawan, N. (2025). Pendidikan literasi politik dan tantangan post-truth dalam ruang publik Indonesia pasca Pemilihan Umum 2024. *Action Research Journal.*

Arianto, B. (2020). Salah kaprah ihwal buzzer: Analisis percakapan warganet di media sosial. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.*

Arianto, B. (2022). Kontestasi buzzer politik dalam langgam politik digital. *MASSIVE: Jurnal Ilmu Komunikasi.*

Assadiyah, D., Kartika, T., Ashaf, A. F., & Putra, P. (2025). Peran buzzer politik Prabowo dalam pembentukan opini publik di media sosial TikTok. *Jurnal Komunikasi.*

Astuti, D. P., & Wulandari, L. (2025). Satire media sosial: Medium baru pembentukan persepsi politik Generasi Z. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*

Bahri, F. N., Putri, A. A., & Harahap, F. A. F. (2026). Analisis perspektif *Eclipse of Reason* Max Horkheimer terhadap fenomena echo chamber. *Jurnal Budi Pekerti Agama.*

Daeni, F. I. M., & Rachmarani, F. A. (2023). Pengaruh buzzer politik dalam pemilu: Tantangan terhadap electoral justice dalam mempertahankan prinsip demokrasi. *Padjadjaran Law Review.*

Dani, A. (2021). Efek ruang gema (echo chambers) terhadap preferensi politik masyarakat pada pemilihan presiden tahun 2019 di Sumatera Barat.

Elza, P. (2025). Pengaruh media sosial terhadap persepsi publik terhadap konflik Israel–Palestina. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*

Faradis, N., & Al Fauzah, N. A. (2023). Media sosial dan persepsi publik: Analisis strategi kampanye digital calon presiden Indonesia 2024. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial.*

Fatih, I. Z. A. (2024). Peran media sosial dalam kampanye politik di Indonesia lima tahun terakhir: Antara demokrasi dan manipulasi informasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.*

Felicia, F., & Loisa, R. (2018). Peran buzzer politik dalam aktivitas kampanye di media sosial Twitter. *Koneksi.*

Greene, M. (2004). Qualitative research and the uses of literature. *Qualitative Research in Education.*

Hamim, U., Kartika, I. T., Sahi, Y., & Kamaru, A. L. (2025). Transformasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Nation Building Bagi Siswa di SMA Negri 7 Gorontalo: Pengabdian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 10140–10152.

Hafizi, R. (2023). Pengaruh media sosial terhadap persepsi masyarakat tentang politik dan partisipasi politik. *Journal of Mandalika Social Science.*

Hidayah, A. R., & Nur, M. A. (2024). Analisis tantangan moderasi beragama di era digital melalui perspektif teori filter bubble dan echo chamber. *Jurnal Sosial Humaniora.*

Husein, M. (2024). Propaganda buzzer politik pada pemilihan presiden 2024. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam.*

Kurniawati, R. (2023). Buzzer sebagai alat politik ditinjau dari perspektif penegakan hukum di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum.*

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

Kurniawan, K. (2025). Political cyberbullying di media sosial TikTok: Studi pemilihan Presiden Indonesia 2024. Repository Universitas Hasanuddin.

Laventia, F., Faizal, A., & Slamet, S. (2025). Pendidikan politik di era digital: Media sosial sebagai katalis atau distorsi? *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Governance.*

Lincoln, Y. S. (2002). Insights into library services and users from qualitative research. *Library & Information Science Research.*

Madamang, I., & Hadmar, A. M. (2025). Dampak teknologi digital dan media sosial terhadap demokrasi. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora.*

Manuputty, C. R., Hanita, M., & Ritonga, R. (2025). Fenomena bias politik media sosial dalam polarisasi selama Pemilihan Umum Presiden 2024. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia.*

Marwan, M. R., Marwan, M. A., & Umniati, N. (2023). Analisis dampak fenomena filter bubble dan echo chamber pada perilaku pencarian informasi pengguna media sosial di Indonesia.

Miqdad, M. (2024). Literature review: Buzzer politik dan pengembangan opini di media sosial di Indonesia. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan.*

Mustika, R. (2019). Pergeseran peran buzzer ke dunia politik di media sosial. *Diakom.*

Nayla, A. (2023). Fenomena echo chamber di media sosial dan dampaknya terhadap polarisasi politik bagi mahasiswa.

Onwuegbuzie, A. J., Leech, N. L., & Collins, K. M. T. (2012). Qualitative analysis techniques for the review of the literature. *The Qualitative Report, 17*(28), 1–28.

Pamungkas, O. (2025). Pengaruh kampanye politik dan media sosial terhadap orientasi politik Generasi Z dalam Pemilu 2024. *Untirta Civic Education Journal.*

Pradana, M. D., Argenti, G., & Adiarsa, S. R. (2023). Analisis framing mengenai pemberitaan buzzer politik di media sosial pada media online detikcom. *Innovative: Journal of Social Science.*

Purnamasari, N. I., & Wijanarko, A. (2024). Peran buzzer politik Ganjar–Mahfud dalam pembentukan opini publik di media sosial X. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia.*

Puspita, A., Suciramdhan, A., & Nazril, M. (2025). Propaganda buzzer sebagai alat politik dalam pengembangan opini di media sosial. *Jurnal Dinamika Sosial dan Politik.*

Rakinda, O. R., & Sutrisno, N. W. A. (2026). Tindakan komunikatif di ruang publik: Menilai demokrasi deliberatif Habermasian dalam tata kelola digital. *Takuana.*

Rambe, A. S., Mardiah, A., & Bahri, F. F. (2025). Peran komunikasi dalam memahami konflik politik. *MUDABBIR: Jurnal Manajemen Dakwah dan Komunikasi.*

Raza, A. M., Aulia, N., & Sopian, S. (2025). The echo chamber effect: Analisis sosiologis peran algoritma media sosial dalam pembentukan solidaritas dan polarisasi kelompok di Indonesia. *Jurnal Bincang Komunikasi.*

Rohim, M., & Wardana, A. (2019). Analisis politik milenial: Persepsi siswa SMA terhadap dinamika politik pada Pemilu 2019 di Indonesia. *Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik.*

Sahi, Y. (2024). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:(Kajian Konseptual, Perbandingan, dan Relevansinya sebagai Sarana

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com

Pendidikan Politik). *JURNAL POLAHI*, *2*(3), 80–94.

Sahi, Y. (2025). DIALEKTIKA MINIMALIS DAN MAKSIMALIS PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA: PERSPEKTIF SEPARATE DAN CIVIC EDUCATION GLOBAL. *JURNAL POLAHI*, *3*(2), 1–17.

Sahi, Y., Jama, S., Hulubangga, A., & Kaaba, A. (2023). PERGULATAN DOKTRIN POLITIK NAHDLATUL ULAMA:(Refleksi Masa kolonial Belanda, Jepang, Era Kemerdekaan, Orde Baru Hingga Pasca Reformasi di Indonesia). *JURNAL POLAHI*, *1*(1).

Sahi, Y., Mahmud, R., & Hamim, U. (2024). Political Preferences of Voters with Disabilities in the 2024 Elections: Values, Perceptions, Trends and Satisfaction Vs Ideological Values and Group Strength. *Journal of Law, Politic and Humanities*, *5*(1), 632–646.

Salmona, M., & Kaczynski, D. (2024). Qualitative data analysis strategies. Dalam *How to Conduct Qualitative Research*. Edward Elgar Publishing.

Sari, M., & Putra, Y. A. (2026). Peran generasi milenial dalam dinamika demokrasi digital di era post-truth. *Journal of Social and Political Inquiry.*

Sinambela, L. (2024). Membongkar algoritma: Studi kualitatif tentang kesadaran pengguna terhadap filter bubble dan echo chamber. *Journal of Global and Multidisciplinary.*

Sugiono, S. (2020). Fenomena industri buzzer di Indonesia: Sebuah kajian ekonomi politik media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi.*

Suriadi, H. (2025). Krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik di era disinformasi digital. *Journal of Social, Educational and Humanities.*

Susilowati, G. A. (2019). Pengaruh sosial media dalam membentuk persepsi pemuda terhadap partisipasi politik. *Ikon: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi.*

Syadila, A. V., Quinna, M. S., & Auliya, S. H. (2025). Industri buzzer dan polarisasi politik di era digital: Perspektif ekonomi politik media. *Tuturlogi: Journal of Communication Studies.*

Tasrif, T. (2025). Konfigurasi dinamika komunikasi digital dalam ranah politik lokal: Telaah taktik media sosial pada arena elektoral Pilkada Kabupaten Bima. *Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.*

Tukan, P. B. (2022). Buzzer politik pembajak demokrasi. *Akademika.*

Wicaksono, M. A. (2024). Peran buzzer dalam membentuk opini publik pada masa pemilu dan dampaknya pasca pemilu. Academia.edu.

Wulandari, T. (2025). Analisis framing negatif buzzer TikTok terhadap paslon Anies–Muhaimin pada kampanye Pilpres 2024. Repository Universitas Malikussaleh.

Wuryanta, A. (2018). Post-truth, cyber identity dan defisit demokrasi. Open Science Framework.

Yulianto, H. (2023). Fenomena buzzer dan perang siber jelang Pemilu 2024: Perspektif netizen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin.*

Yunita, Y. (2002). Pengaruh berita di surat kabar terhadap persepsi mahasiswa tentang politik. *Mediator: Jurnal Komunikasi.*

Corresponding author: faradibaazzahra@gmail.com